

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Makassar. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 4.
- Bappenas. (2023). Laporan Koordinasi Pelayanan Informasi Publik 2023. Biro Hubungan Masyarakat, Kerasipan, Dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Kementerian Ppn/Sekretariat Utama Bappenas Kementerian Ppn/Bappenas Laporan.
- Bonti, Lya T. A. D. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Alya. 14(1), 152–160.
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang. 11(02), 31–45.
- Depari, Eduard, and Colin MacAndrews. 2006. Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Elshifa, Nugraha, B., & Jamaluddin, A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan).
- Feltynowski, M. (2020). Spatial Information Systems – A Tool Supporting Good Governance In Spatial Planning Processes Of Green Areas. Jura - Juristische Ausbildung, 7, 69.
- Fitriani, A. (2023). Keterbukaan Informasi Publik. 21(1), 220–228.
- Fusi, F. (2022). Unveiling justice through open government data: Work in progress for most US states. Public Administration.
- Hakim, Lukman, & Kurniawan, Nalom. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, 18(4), 869–897.
- Hardiyanto, N., & Firdaus, A. (2021). Website Quality and The Role of Customer Satisfaction Toward Repurchase Intention: A Study of Indonesian E-Commerce. Journal of Marketing Innovation (JMI).
- Ilham. 2021. E-Governance. Sleman: Deepublish Publisher.
- Khan, A.U. (2020). Islam and Good Governance: A Political Economy Perspective.
- Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 9–16.

- Lendong, G. N. ▪ R. N. (2021). Bunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Issue June). Komisi Informasi Pusat Ri.
- Mafturrahman, Aria Elshifa, Budi Nugraha, and Aghus Jamaluddin. 2022. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)." *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi 2* (2): 1–12.
<https://doi.org/10.55606/jurima.v2i2.226>.
- M.D. Anggrahini, dkk. (2014). "Peran Humas Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Pengelolaan Isi Informasi Website Pemda Sebagai Media Komunikasi Hubungan Dengan Masyarakat." *Ilmu Komunikasi 6*: 145–52.
- Nasution, Chairika, & Thamrin, Husni. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(2), 105–119. DOI:
<https://doi.org/10.31289/publika.v4i2.415>
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. (2022).
- Prita Rara Ulumiyah, R. A. G. (2024). Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website Ppid Kementerian PEMBERDAYAAN Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42.
- Pusat, K. I. (2021). Transformasi Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Wisma.
- Rachman, M. (2023). Birokrasi Dan Public Governance. Birokrasi Dan Public Governance Suhardiman Marjoni Rachman Jamiah Tahta.
- Rahimallah, M. T. A. (2022). Pengelolaan Minerba Dalam Perspektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif).
- Ricky, M. T. A. R. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi) Public Information Disclosure In Indonesia (Accountability , Transparency And Participation Perspective). 12(2), 62–75.
- Rustandi, N. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dan Kebebasan Pers Dalam Konteks Reformasi Birokrasi. 6(September), 98–111.
- Sa'ban, L. M. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Kota Baubau. 11(1), 48–57.
- Savina, A. (2024). Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Ppid Kabupaten Karawang (Tantangan Dan Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik). 5(4), 6445–6450.

- Sondakh, D. K. A. M., & Koagouw, F. V. I. A. (2019). Mplementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Tentang Penerapan Uu No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado) Oleh. 14.
- Suryani, Dewi Amanatun. 2019. "Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa." *Journal of Public Administration and Local Governance* 3 (1): 52.
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan Implementation Of Public Information Disclosure On South Global Challenge In The New Millennium Pada. 6(2), 209–218.
- Ulandari, C. S. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kabupaten Simeulue Dalam Upaya Pemberian Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 1, 13–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan. (2008).
- Yang, T. M., & Maxwell, T. A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. *Government Information Quarterly*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X1000132>
- Yusup, P. M. (2013). *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Kepustakaan*. Bumi Aksara.